

salah satu dari alat bukti adalah saksi. Diantara hakim, pihak yang berperkara dan pihak ketigayang lain itulah yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesalahan hakim dalam memberikan putusan.

Tetapi apabila kesalahan itu bukan di sengaja, maka hakim tetap membayar kerugian dan putusannya dianggap batal. (Prof. Dr. Hasbi Ash Shiddieqy : 64)

Dalam hal yang demikian hakim mempunyai dua pilihan yaitu :

1. Membatalkan putusannya secara langsung tanpa diminta oleh pihak yang berkepentingan dengan catatan sesuatu yang diputuskan itu berkaitan dengan hak Allah.
2. Membatalkan putusannya dengan catatan harus ada permintaan dari pihak yang berperkara yaitu suatu perkara yang berkaitan dengan hak-hak adami.

Sehubungan dengan hal ini maka apabila putusan godli yang dijatuhkan itu ternyata diperselisihkan karena kealpaan, kemudian perkara tadi diajukan pada godli lainnya setelah dibuktikan, bahwa pendapat godli (yang telah menjatuhkan putusannya) tadi berbeda dengan keputusan yang telah diajukan itu, bahwa ia memutus dalam keadaan alpa, maka godli (baru) yang diajukan perkara kepadanya itu akan membatalkan putusan godli terdahulu. (Moh. Salam Madkur, 1979 : 78)

Dan apabila pihak yang dirugikan haknya oleh godli atas dakwaan yang tidak bersihnya godli dalam putusannya,

maka hak untuk menuntut rehabilitasi bagi terdakwa setelah dinyatakan tidak bersalah oleh godli atau majelis hakim dalam pengadilan, karena atas tuduhan atau dakwaan yang telah membuat nama mereka tercoreng.

Mengenai tuntutan orang terhukum karena adanya kekeliruan, untuk ditinjau kembali hukuman yang telah dijatuhkan atas dirinya dan menerangkan sebab-sebab yang dapat diterima atau tidak.

Maka agar terdakwa tidak dirugikan dengan sesuatu yang tidak diperbuat sebelumnya, hakim wajib menghilangkan hal-hal yang menyebabkan kerugian tersebut. Karena undang-undang telah mengatur cara-cara untuk menyelesaikan suatu perkara melalui hakim dengan putusannya.

Hanya para pembuat undang-undang setelah menyadari bahwa kemungkinan salah bagi hakim dalam menjatuhkan putusan itu selalu ada maka dibuatlah undang-undang yang memperkenankan peninjauan kembali. Hanya pembuat undang-undang yang masih memberikan pengecualian sebagian putusan boleh dimintakan peninjauan kembali kepada pengadilan yang mengeluarkan putusan tersebut.